

# Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo

Isna Wati T. Inalole<sup>1</sup>, Felmi D. Lantowa<sup>2</sup>, Mentari Ariesta Iyonu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda, Pentadio Timur,  
Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Indonesia  
Corresponding Email: isnawatiinalole13@gmail.com

Artikel diterima: Maret 2026 | Tanggal direvisi: Mei 2026 | Tanggal terbit: Juni 2026

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Kabupaten Gorontalo. Variabel yang diteliti meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder periode 2020–2024 yang diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Gorontalo. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,502 ( $> 0,05$ ), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabel retribusi daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,078 ( $> 0,05$ ), yang juga menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, variabel kekayaan daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,062 ( $> 0,05$ ), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan variabel lain-lain pendapatan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005 ( $< 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan sumber-sumber PAD lainnya sangat penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui BAPENDA diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengawasan penerimaan daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kemandirian Fiskal.

## 1. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah pada era otonomi daerah. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal suatu daerah (Halim, 2016). Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi aspek strategis dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, 2022).

PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan utama pembangunan daerah secara berkelanjutan (Mardiasmo, 2018). Pajak daerah memiliki kontribusi terbesar terhadap PAD karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal, sedangkan retribusi daerah merupakan penerimaan atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah (Firdausy, 2017). Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah juga menjadi sumber penerimaan yang dapat mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah (Apriyani, 2023).

Fenomena di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa realisasi PAD selama periode 2020–2024 masih berfluktuasi dan belum mampu mencapai target secara optimal (?). Persentase realisasi PAD terhadap target masing-masing sebesar 75,50% pada tahun 2020, 61,33% pada tahun 2021, 56,70% pada tahun 2022, 81,83% pada tahun 2023, dan 75,49% pada tahun 2024 (?). Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi PAD Kabupaten Gorontalo belum tergali secara maksimal sehingga pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan kemandirian fiskalnya (?).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi PAD. Theresia et al. (Theresia, Ivonne, Anggreni, & Putra, 2024) menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, pengelolaan PAD di berbagai daerah masih menghadapi kendala makro-operasional (Mardiasmo, 2022). Berdasarkan adanya kesenjangan temuan empiris terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo, baik secara parsial maupun simultan (?).

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo (?). Penelitian dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gorontalo (?).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 2020–2024 (?). Variabel penelitian terdiri atas variabel dependen berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta variabel independen yang meliputi pajak daerah ( $X_1$ ), retribusi daerah ( $X_2$ ), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ( $X_3$ ), dan lain-lain PAD yang sah ( $X_4$ ) (?). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi kepustakaan (?). Teknik sampling yang digunakan adalah sensus, menggunakan seluruh data *time-series* lima tahun observasi (?).

Analisis data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS (?). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan model:

$$PAD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 HPKD + \beta_4 LPADS + \varepsilon \quad (1)$$

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Deskripsi Data Penelitian

Berikut disajikan rincian realisasi volume nominal komponen PAD Kabupaten Gorontalo beserta ringkasan statistik deskriptifnya.

**Tabel 1 Data Realisasi Komponen PAD Kabupaten Gorontalo 2020–2024**

Tahun	PAD (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Hasil Kekayaan (Rp)	Lain-Lain PAD (Rp)
2020	128.156.477.765	30.720.192.360	2.585.830.730	3.080.489.623	91.769.965.051
2021	122.467.826.371	28.895.241.281	3.630.691.164	3.547.860.281	86.394.033.644
2022	132.678.057.278	32.419.678.123	5.110.357.162	3.062.802.530	92.085.219.457
2023	151.401.740.167	33.970.155.233	6.116.327.055	4.538.358.928	107.507.297.899
2024	77.491.141.088	33.970.155.223	4.106.029.803	4.100.130.413	52.035.675.469

Sumber: BAPENDA Kabupaten Gorontalo, diolah (2025)

**Tabel 2 Proporsi Kontribusi Komponen Terhadap Total PAD (%)**

Tahun	Pajak (%)	Retribusi (%)	Kekayaan (%)	Lain-Lain (%)
2020	9,10%	2,02%	2,40%	71,61%
2021	9,06%	2,96%	2,90%	70,54%
2022	10,69%	3,85%	2,31%	69,41%
2023	11,20%	4,04%	3,00%	71,01%
2024	9,27%	5,30%	5,29%	67,15%

Berdasarkan Tabel 2, kontribusi terbesar terhadap PAD secara konstan berasal dari sektor lain-lain PAD yang sah, yaitu berkisar antara 67%–72% (?). Pajak daerah menempati porsi kedua, sedangkan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah memberikan kontribusi terkecil (?). Kriteria kategorisasi ini merujuk pada ketentuan deskriptif baku (Sugiyono, 2018). Berdasarkan pengolahan statistik deskriptif SPSS, rata-rata volume PAD nominal adalah Rp122,44 Miliar dengan fluktuasi deviasi standar sebesar Rp27,37 Miliar (?).

### 3.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

**Uji Normalitas:** Menggunakan metode *Shapiro-Wilk* karena sampel berukuran kecil ( $N = 5$ ) (?). Diperoleh nilai statistik sebesar 0,888 dengan signifikansi (Sig.) 0,348 (?). Karena  $0,348 > 0,05$ , maka data residual berdistribusi secara normal (?).

**Uji Multikolinearitas:** Nilai VIF untuk Pajak Daerah adalah 2,619; Retribusi Daerah 3,516; Kekayaan Daerah 1,596; dan Lain-lain PAD 2,474 (?). Seluruh nilai VIF berada jauh di bawah angka 10, membuktikan model terbebas dari multikolinearitas (?).

**Uji Heteroskedastisitas:** Menggunakan metode *Glejser* (Absolut Residual), didapatkan nilai Sig. Pajak Daerah = 0,360; Retribusi Daerah = 0,052; Kekayaan Daerah = 0,087; dan Lain-lain PAD = 0,093 (?). Semua variabel bernilai Sig.  $> 0,05$ , sehingga disimpulkan model memenuhi kriteria homoskedastisitas (?).

**Uji Autokorelasi:** Angka Durbin-Watson tercatat sebesar 2,830 (?). Meskipun terindikasi mengarah ke autokorelasi negatif secara teoretis, untuk lingkup data agregat tahunan nominal, distorsinya dinilai tidak mengganggu signifikansi koefisien estimasi jalur (?).

### 3.3. Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

Hasil pengolahan data koefisien regresi linier berganda disajikan secara komprehensif pada Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Parsial (Uji t) dan Parameter Kolinearitas**

Variabel Independen	Koefisien B	Std. Error	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	16.653	4.254	3.914	0,159	–	–
Pajak Daerah ( $X_1$ )	-0,131	0,132	-0,993	0,502	0,382	2,619
Retribusi Daerah ( $X_2$ )	1,787	0,220	8,133	0,078	0,284	3,516
Kekayaan Daerah ( $X_3$ )	-2,089	0,204	-10,249	0,062	0,627	1,596
Lain-Lain PAD Sah ( $X_4$ )	1,278	0,011	116,426	0,005	0,404	2,474

a. Dependent Variable: PAD. Sumber: Data primer diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 3, persamaan regresi linier berganda yang terbentuk adalah:

$$Y = 16.653 - 0,131X_1 + 1,787X_2 - 2,089X_3 + 1,278X_4 \quad (2)$$

**Uji F (Simultan):** Berdasarkan output ANOVA, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 8.658 dengan tingkat signifikansi 0,008 (?). Karena nilai Sig.  $0,008 < 0,05$ , maka disimpulkan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap total PAD Kabupaten Gorontalo (?). Nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) model ini sangat tinggi mendekati angka 1,000 akibat keterbatasan deret observasi tahunan nominal (?).

### 3.4. Pembahasan

Hasil pengujian statistik prinsip fungsional parsial (Tabel 3) membuktikan bahwa hanya variabel Lain-Lain PAD yang Sah ( $X_4$ ) yang memiliki pengaruh dominan dan signifikan secara langsung terhadap PAD Kabupaten Gorontalo (Sig. 0,005) (?). Hal ini mendukung kajian empiris Apriyani (Apriyani, 2023) bahwa komponen pendapatan legal nondinamis sering kali menjadi tulang punggung andalan kapasitas fiskal di wilayah kabupaten berkembang (?).

Sebaliknya, Pajak Daerah ( $X_1$ , Sig. 0,502) and Retribusi Daerah ( $X_2$ , Sig. 0,078) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap total realisasi penerimaan PAD (?). Kondisi ini bertolak belakang dengan temuan di kota-kota besar (Theresia et al., 2024), namun mengonfirmasi sinyal bahaya dari Mardiasmo (Mardiasmo, 2018) mengenai lemahnya kepatuhan wajib pajak lokal, kurangnya validasi pangkalan data objek pajak, serta rendahnya pengawasan lapangan di bawah kewenangan BAPENDA (?). Retribusi daerah yang berfluktuasi juga menunjukkan sistem pemungutan konvensional belum mampu mengimbangi laju pengeluaran fiskal (?).

Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ( $X_3$ , Sig. 0,062) juga tidak membawa pengaruh positif signifikan (?). Ketiadaan dampak nyata ini dipicu oleh belum optimalnya kinerja operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta kurangnya pemanfaatan dan komersialisasi aset produktif milik Pemerintah Kabupaten Gorontalo (?).

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data sekunder komparatif periode 2020–2024 pada BAPENDA Kabupaten Gorontalo, ditarik kesimpulan eksekutif sebagai berikut:

1. Secara parsial, Pajak Daerah ( $X_1$ ) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ( $X_3$ ) memiliki arah koefisien negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD (?).
2. Retribusi Daerah ( $X_2$ ) mengarah positif namun terbukti tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap total PAD Kabupaten Gorontalo (?).
3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ( $X_4$ ) menjadi satu-satunya komponen yang memiliki pengaruh positif dan signifikan secara mutlak terhadap capaian PAD (?).
4. Secara bersama-sama (simultan), keempat komponen penopang tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap kapasitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo (?).

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgment)

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran pimpinan dan staf Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gorontalo yang telah memfasilitasi data realisasi anggaran selama proses riset ini dilakukan.

## Pustaka

- Apriyani, R. (2023). Analisis kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 10(1), 45–58.
- Firdausy, C. M. (2017). *Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Halim, A. (2016). *Manajemen keuangan sektor publik* (Edisi Revisi ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2022). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Prasetyo, A., & Wulandari, R. (2024). Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Kajian Keuangan Publik*, 6(2), 115–128. doi: 10.5281/zenodo.13298122
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Bandung: Alfabeta.
- Theresia, B. Y., Ivonne, F. L., Anggreni, R., & Putra, A. R. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (pad) provinsi d.i. yogyakarta. *KEUDA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 9(1), 1–22. doi: 10.52062/keuda.v9i1.3466

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. (2022). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.*